

## Tata Kelola Wisata Hutan Mangrove Di Desa Ogomolos Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong

Anggi Apriliani<sup>a</sup>, Muhammad Nawawi<sup>b</sup>, Irwansyah Kamindang<sup>c</sup>

<sup>a,b,c</sup> Universitas Tadulako

Email : [anggiiapriliani@gmail.com](mailto:anggiiapriliani@gmail.com)\*

### INFO ARTIKEL

**Riwayat Artikel:**

Received : 20 Maret 2026

Revised : 17 April 2026

Accepted : 25 April 2026

**Keywords:**

Notary Responsibility, Sale  
and Purchase Agreement,  
Document Forgery.

**Kata Kunci:**

Tanggungjawab Notaris,  
Perjanjian Pengikatan Jual  
Beli, Pemalsuan Dokumen

**DOI: 10.62335**

### ABSTRACT

*Environmental-based tourism development has become an important strategy for promoting local economic growth while ensuring the sustainability of coastal ecosystems. One form of environmentally based tourism with considerable potential is mangrove forest tourism. This study aims to analyze the governance of mangrove forest tourism in Ogomolos Village, Mepanga District, Parigi Moutong Regency. This study employs a qualitative-descriptive approach to provide an in-depth understanding of mangrove tourism governance. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The analysis is based on the Destination Management Organization (DMO) framework proposed by Sheehan & Ritchie (2005), which includes the aspects of coordination of tourism stakeholders, destination crisis management, and destination marketing. The results indicate that the management of mangrove forest tourism in Ogomolos Village involves collaboration between the village government and the Tourism Awareness Group (Pokdarwis). The village government plays a role in policy formulation and budget support, while Pokdarwis is responsible for the operational management of the tourism area, maintaining environmental sustainability, and supporting tourism activities. However, the governance of the tourism destination has not yet been optimal. This is due to weak coordination among stakeholders that has not been formally institutionalized, the absence of an adequate destination crisis management system, and limited destination marketing strategies that have not yet fully utilized digital media.*

### ABSTRAK

Pengembangan pariwisata berbasis lingkungan menjadi salah satu strategi penting dalam mendorong pembangunan ekonomi lokal sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir. Salah satu bentuk wisata berbasis lingkungan yang memiliki potensi besar adalah wisata hutan mangrove. Studi ini bertujuan menganalisis tata kelola wisata hutan mangrove di Desa Ogomolos, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif

untuk menggambarkan secara mendalam tata kelola wisata hutan mangrove. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis menggunakan kerangka teori *Destination Management Organization* (DMO) oleh (Sheehan & Ritchie, 2005), yang meliputi aspek *coordination of tourism stakeholders*, *destination crisis management*, dan *destination marketing*. Hasil studi menunjukkan bahwa pengelolaan wisata hutan mangrove di Desa Ogomolos telah melibatkan kerja sama antara pemerintah desa dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Pemerintah desa berperan dalam penyusunan kebijakan dan dukungan anggaran, sementara Pokdarwis bertanggung jawab terhadap pengelolaan operasional kawasan wisata serta menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung aktivitas wisata. Namun demikian, tata kelola destinasi wisata tersebut belum berjalan secara optimal, disebabkan oleh lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan yang belum terlembaga secara formal, belum adanya sistem manajemen krisis destinasi yang memadai, serta strategi pemasaran destinasi yang masih terbatas dan belum memanfaatkan media digital secara optimal.

## LATAR BELAKANG

Pengembangan sektor pariwisata berbasis lingkungan menjadi salah satu strategi penting dalam mendorong pembangunan ekonomi lokal sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem. Salah satu bentuk pariwisata yang memiliki potensi besar dalam mendukung tujuan tersebut menurut (Prihadi et al., 2025), adalah wisata hutan mangrove. Sebab ekosistem mangrove tidak hanya berfungsi sebagai pelindung alami wilayah pesisir dari abrasi dan intrusi air laut, tetapi juga menjadi habitat berbagai jenis biota serta memiliki nilai ekologis dan ekonomis yang tinggi bagi masyarakat pesisir. Dalam konteks pembangunan pariwisata menurut (Wahyundi et al., 2023), tata kelola destinasi wisata memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan pengembangan suatu kawasan wisata. Tata kelola yang baik tidak hanya berkaitan dengan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga mencakup aspek koordinasi antar pemangku kepentingan, pemanfaatan sumber daya secara efektif, serta keberlanjutan pengelolaan destinasi dalam jangka panjang. Dengan demikian, pengembangan wisata tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kualitas pengelolaan destinasi yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat lokal secara berkelanjutan.

Pengembangan pariwisata di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang menekankan prinsip keberlanjutan, pelestarian lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat lokal. Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengelola dan mengembangkan potensi sumber daya alam dan budaya yang dimiliki, termasuk potensi pariwisata desa, sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya regulasi tersebut, pengelolaan wisata desa diharapkan dapat dilakukan secara terencana, partisipatif, dan berorientasi pada keberlanjutan (Bender, 2016).

Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam pesisir yang cukup besar, termasuk kawasan hutan mangrove yang tersebar di beberapa desa pesisir. Potensi ini membuka peluang bagi pengembangan wisata berbasis lingkungan yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana rekreasi, tetapi juga sebagai media edukasi dan konservasi ekosistem pesisir. Namun demikian, pemanfaatan potensi wisata mangrove di beberapa desa masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek tata kelola, kapasitas kelembagaan, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung wisata (Syam, 2025). Salah satu desa yang memiliki potensi wisata mangrove adalah Desa Ogomolos yang terletak di Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong. Kawasan mangrove di desa ini memiliki luas sekitar 51 hektar dan mulai dikembangkan sebagai destinasi wisata sejak tahun 2020. Pemerintah desa bahkan telah mengalokasikan dana desa sebesar Rp100.000.000 pada tahun 2021 untuk pembangunan jembatan kayu sebagai akses utama bagi pengunjung dalam menyusuri kawasan mangrove. Meskipun demikian, pengembangan wisata mangrove di Desa Ogomolos belum berjalan secara optimal.

Permasalahan utama berkaitan dengan tata kelola destinasi wisata yang masih menghadapi berbagai kendala. Koordinasi antara pemerintah desa dan masyarakat yang terlembagakan dalam Kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis telah terjalin baik, namun belum berjalan optimal. Selain itu, masih terdapat sarana prasarana dan aksesibilitas wisata yang masih terbatas, seperti akses jalan menuju lokasi yang kurang memadai dan minimnya fasilitas umum bagi pengunjung. Kondisi tersebut berdampak pada minimnya jumlah pengunjung dan kekurangnyamanan para pengunjung yang datang di obyek wisata mangrove tersebut. Disisi lain, pengelolaan destinasi wisata mangrove tersebut juga belum didukung oleh strategi pemasaran yang efektif. Promosi wisata masih bersifat konvensional dan belum memanfaatkan media digital secara optimal, sehingga obyek wisata mangrove tersebut belum tersosialisasi secara luas di luar wilayah desa Ogomolos. Bahkan pengelolaan risiko dan mitigasi terhadap potensi gangguan lingkungan juga belum terencana secara sistematis dalam pengelolaan destinasi wisata.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan wisata mangrove sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola destinasi. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Nainggolan dkk., 2024), menunjukkan bahwa pengelolaan wisata mangrove memerlukan keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan serta penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas. Namun dalam praktiknya, keterlibatan aktor-aktor tersebut sering kali belum berjalan secara optimal sehingga pengelolaan destinasi wisata mangrove belum dapat memberikan manfaat secara maksimal bagi masyarakat maupun lingkungan. Untuk itu, berdasarkan uraian tersebut, maka pertanyaan yang hendak dijawab dalam studi ini adalah bagaimana tata kelola wisata hutan mangrove di Desa Ogomolos, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong?. Sejalan dengan itu, maka studi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tata kelola hutan mangrove di desa Ogomolos, kecamatan Mepanga, kota Palu.

## KAJIAN PUSTAKA

### Konsep Tata Kelola

Tata kelola menurut Bevir (2011) (dalam Glückler dkk., 2020) adalah konsep kunci dalam ilmu sosial. Rhodes (1997) (dalam Glückler dkk., 2020), istilah ini merujuk pada proses pengelolaan berbasis jaringan yang melibatkan berbagai sektor dan organisasi, yang menghasilkan pengambilan keputusan secara kolaboratif dan melalui negosiasi. Tata kelola menghadirkan gambaran tentang pengetahuan pemerintah mengenai populasi dan sikap mereka, pengetahuan teknis tentang ruang dan sifat fisiknya, proses birokrasi formal dan informal dalam mendefinisikan masalah, serta penciptaan pengetahuan melalui keterlibatan para pemangku kepentingan untuk menangani isu-isu sosial yang mendesak. Pemahaman tentang tata kelola ini memiliki nuansa normatif. Jika dijalankan dengan baik, tata kelola akan menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih adil, berkeadilan sosial, dan berbasis konsensus melalui integrasi berbagai suara pemangku kepentingan dan keahlian teknis.

Sejak tahun 1980-an, kata tata kelola atau *governance* menurut (Bevir, 2012) menjadi sangat umum digunakan. Apa yang menyebabkan penyebaran cepat istilah tata kelola?. Apa yang dimaksud dengan tata kelola?. Bagaimana perbedaannya dengan pemerintahan atau government?. Singkatnya, tata kelola menyebar dengan cepat karena perubahan dalam teori sosial membuat orang melihat dunia secara berbeda, sekaligus karena dunia itu sendiri memang telah berubah. Teori dan praktik baru mengalihkan perhatian dari institusi utama negara menuju aktivitas mengelola (*governing*), dan kini banyak aktivitas tersebut melibatkan organisasi swasta dan sukarela, selain organisasi publik. Oleh karena itu, tata kelola merujuk pada semua proses pengelolaan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, pasar, maupun jaringan, baik dalam lingkup keluarga, suku, organisasi formal maupun informal, atau wilayah, serta melalui hukum, norma, kekuasaan, maupun bahasa. Untuk itu tata kelola berbeda dari pemerintahan karena tidak hanya berfokus pada negara dan institusinya, tetapi lebih pada praktik dan aktivitas sosial.

Tugas pertama menurut (Bevir, 2012) adalah menunjukkan bahwa tata kelola merupakan konsep yang koheren dan memiliki kegunaan nyata. Beberapa pihak yang skeptis menganggap tata kelola hanyalah jargon belaka. Istilah tata kelola mungkin terlihat sebagai kata yang samar, sebuah eufemisme yang kabur untuk pemerintahan. Pihak skeptis lainnya berpendapat bahwa kata tata kelola digunakan begitu luas sehingga menjadi kehilangan makna atau terasa usang. Pembahasan tentang tata kelola muncul dalam berbagai konteks dan disiplin ilmu, termasuk studi pembangunan, ekonomi, geografi, hubungan internasional, perencanaan, ilmu politik, administrasi publik, dan sosiologi. Namun, masih terlalu sedikit perhatian yang diberikan pada cara memahami keseluruhan literatur tentang tata kelola tersebut.

### Tata Kelola Pariwisata

Menurut (Sheehan & Ritchie, 2005), *Destination Management Organization* (DMO) berperan sebagai pengarah (*steering*) dalam pengelolaan destinasi wisata, yaitu dengan mengoordinasikan berbagai kepentingan yang ada agar pengembangan destinasi dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Dalam kerangka ini, DMO berfungsi sebagai integrator kepentingan berbagai aktor, koordinator

kebijakan dan program pariwisata, serta penjaga keberlanjutan destinasi wisata. Dengan ini, keberadaan DMO menjadi sangat penting dalam menciptakan sistem tata kelola destinasi wisata yang mampu menyinergikan berbagai aktor yang terlibat dalam pengembangan pariwisata. Dalam kerangka analisis tata kelola destinasi wisata tersebut, DMO menekankan tiga dimensi utama yang menjadi indikator penting dalam pengelolaan destinasi, yaitu *coordination of tourism stakeholders*, *destination crisis management*, dan *destination marketing*. Ketiga dimensi tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana pengelolaan destinasi wisata dapat berjalan secara efektif melalui koordinasi antar pemangku kepentingan, pengelolaan risiko destinasi, serta strategi pemasaran yang mampu meningkatkan daya tarik wisata.

### **Kebijakan Pariwisata**

Kebijakan pariwisata merupakan aturan dan strategi yang dibentuk dan ditetapkan pemerintah untuk mengarahkan pengembangan sektor pariwisata. Di Indonesia, kebijakan tersebut berwujud pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengembangan pariwisata dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan budaya lokal. Menurut (Dos Anjos & Kennell, 2019), dalam konteks pembangunan daerah, kebijakan pariwisata menjadi instrumen penting dalam mengoptimalkan potensi wisata yang dimiliki oleh suatu wilayah. Melalui kebijakan yang tepat, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan destinasi wisata, termasuk melalui pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan kelembagaan pengelola wisata. Kebijakan pariwisata juga memiliki peran penting dalam mengatur hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam pengelolaan destinasi wisata. Dengan adanya kebijakan yang jelas dan terarah, pengembangan pariwisata dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi dan berkelanjutan. Selain itu, kebijakan pariwisata juga menjadi dasar bagi pengelolaan berbagai potensi wisata lokal, termasuk wisata berbasis lingkungan seperti wisata hutan mangrove yang memerlukan pengelolaan yang sensitif terhadap kondisi ekosistem.

### **Tata Kelola Wisata Hutan Mangrove di Indonesia**

Wisata hutan mangrove merupakan salah satu bentuk ekowisata yang berkembang pesat di berbagai wilayah pesisir di Indonesia. Pengembangan wisata mangrove tidak hanya berfungsi sebagai sarana rekreasi, tetapi juga sebagai media edukasi lingkungan serta upaya konservasi ekosistem pesisir. Oleh karena itu, pengelolaan wisata mangrove memerlukan pendekatan tata kelola yang mampu mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang. Dalam praktiknya, pengelolaan wisata mangrove sering kali melibatkan berbagai aktor, seperti pemerintah daerah, masyarakat lokal, kelompok pengelola wisata, serta organisasi lingkungan. Keterlibatan berbagai pihak tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan wisata mangrove memerlukan koordinasi yang kuat agar berbagai program pengembangan dapat berjalan secara efektif. Tanpa koordinasi yang baik, pengembangan wisata mangrove berpotensi menghadapi berbagai permasalahan, seperti kerusakan ekosistem, konflik kepentingan antaraktor, serta tidak optimalnya pengelolaan destinasi wisata (Harefa dkk., 2024).

## **METODE PENELITIAN**

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Pendekatan ini bertujuan menggali dan memahami fenomena sosial yang terjadi dalam tata kelola wisata hutan mangrove. Tipe deskriptif yang digunakan dalam studi ini untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai tata kelola wisata hutan mangrove, dengan pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam kerangka analisis, studi ini menggunakan kerangka teoritis *Destination Management Organization (DMO)* yang dikemukakan oleh (Sheehan & Ritchie, 2005) melalui tiga aspek yakni, *coordination of tourism stakeholders, destination crisis management, destination marketing*. Ketiga aspek tersebut menjadi dasar dalam menganalisis tata kelola wisata hutan mangrove di desa Ogomolos.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Hutan Mangrove Desa Ogomolos**

Hutan mangrove di Desa Ogomolos merupakan salah satu ekosistem pesisir yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus memiliki potensi ekonomi bagi masyarakat setempat. Keberadaan kawasan mangrove ini tidak hanya berfungsi sebagai pelindung alami wilayah pesisir dari abrasi dan gelombang laut, tetapi juga menjadi habitat berbagai jenis biota laut serta sumber penghidupan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan tersebut. Sebagai desa yang berada di wilayah pesisir, masyarakat Ogomolos memiliki hubungan yang cukup erat dengan keberadaan ekosistem mangrove, baik dalam konteks pemanfaatan sumber daya alam maupun dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan pesisir. Dalam beberapa tahun terakhir, kawasan mangrove di Desa Ogomolos mulai dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis lingkungan (ekowisata). Pengembangan wisata ini dilakukan oleh pemerintah desa bersama masyarakat dengan tujuan untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan serta meningkatkan perekonomian masyarakat lokal. Kawasan wisata mangrove tersebut dirancang sebagai tempat rekreasi sekaligus edukasi lingkungan yang memungkinkan pengunjung untuk menikmati keindahan alam sekaligus memahami pentingnya menjaga ekosistem pesisir.

Upaya pengembangan wisata mangrove di Desa Ogomolos juga tercermin dalam penyusunan master plan pengembangan kawasan wisata hutan mangrove oleh pemerintah desa. Master plan tersebut mencakup rencana pembangunan jalur wisata berupa *trekking mangrove*, pembangunan jembatan kayu, serta penyediaan fasilitas pendukung lainnya yang memungkinkan pengunjung mengakses kawasan mangrove secara lebih terarah dan aman. Selain itu, dalam rencana pengembangan tersebut juga dirancang pembangunan dermaga kecil dan area penunjang wisata yang bertujuan untuk meningkatkan daya tarik kawasan wisata mangrove. Kondisi nyata di kawasan wisata mangrove di Desa Ogomolos telah memiliki beberapa fasilitas dasar yang dibangun melalui dukungan pemerintah desa, termasuk pembangunan jembatan kayu yang berfungsi sebagai jalur utama bagi pengunjung untuk menyusuri kawasan mangrove. Fasilitas ini tidak hanya mempermudah akses wisatawan, tetapi juga berfungsi untuk melindungi ekosistem mangrove agar tidak rusak akibat aktivitas pengunjung yang berjalan langsung di area akar mangrove. Selain itu, kawasan ini juga dilengkapi

dengan beberapa fasilitas sederhana yang mendukung aktivitas wisata, meskipun pengembangannya masih terus dilakukan secara bertahap.

Pengelolaan kawasan wisata mangrove di Desa Ogomolos melibatkan berbagai pihak, terutama pemerintah desa, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), serta masyarakat setempat. Pokdarwis memiliki peran penting dalam menjaga kondisi kawasan wisata, termasuk melakukan pengawasan terhadap kebersihan lingkungan, memantau kondisi fasilitas wisata, serta mengingatkan pengunjung agar tidak merusak ekosistem mangrove. Upaya tersebut dilakukan sebagai langkah pencegahan untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memastikan keberlanjutan kawasan wisata mangrove. Selain itu, masyarakat setempat juga turut berperan dalam menjaga keberlangsungan kawasan wisata mangrove melalui berbagai kegiatan seperti kerja bakti membersihkan kawasan wisata serta membantu dalam pemeliharaan fasilitas yang rusak. Partisipasi masyarakat ini menunjukkan bahwa pengelolaan wisata mangrove di Desa Ogomolos tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah desa atau kelompok pengelola wisata, tetapi juga melibatkan peran aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir.

Pengembangan kawasan wisata hutan mangrove di Desa Ogomolos masih menghadapi beberapa tantangan, terutama dalam hal keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan wisata. Selain itu, pengelolaan kawasan wisata mangrove juga masih memerlukan perencanaan yang lebih terstruktur agar pengembangan wisata dapat berjalan secara berkelanjutan tanpa mengganggu keseimbangan ekosistem mangrove yang menjadi daya tarik utama kawasan tersebut. Dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki, kawasan wisata hutan mangrove di Desa Ogomolos memiliki peluang yang cukup besar untuk dikembangkan sebagai destinasi ekowisata berbasis masyarakat. Pengembangan yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat serta menjaga kelestarian ekosistem mangrove sebagai bagian penting dari lingkungan pesisir.

### **Tata Kelola Wisata Hutan Mangrove di Desa Ogomolos**

Hasil studi menunjukkan bahwa pengelolaan wisata hutan mangrove di Desa Ogomolos dilaksanakan melalui kerja sama antara pemerintah desa, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), dan masyarakat setempat. Bentuk kolaborasi tersebut terlihat dari pembagian peran yang relatif jelas antara aktor-aktor yang terlibat. Pemerintah desa berperan dalam perumusan kebijakan, penyediaan dukungan anggaran melalui dana desa, serta memfasilitasi perencanaan pengembangan kawasan wisata. Sementara itu, Pokdarwis bertanggung jawab terhadap pengelolaan operasional kawasan wisata, seperti pengelolaan fasilitas, pengaturan aktivitas wisata, serta pemeliharaan lingkungan kawasan mangrove. Di sisi lain, masyarakat setempat turut berpartisipasi dalam kegiatan pendukung, seperti menjaga kebersihan kawasan, memelihara ekosistem mangrove, serta menyediakan berbagai usaha kecil yang mendukung aktivitas wisata di sekitar lokasi. Koordinasi antaraktor dalam pengelolaan wisata dilakukan melalui berbagai pertemuan atau forum komunikasi yang diselenggarakan secara berkala. Dalam forum tersebut, para pemangku kepentingan membahas berbagai rencana kegiatan, pembagian tugas, serta evaluasi pengelolaan wisata. Pembagian peran yang disepakati bersama biasanya dituangkan dalam bentuk kesepakatan kerja sederhana atau pengaturan internal yang

menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan wisata. Selain itu, kawasan wisata mangrove di Desa Ogomolos telah memiliki beberapa fasilitas dasar seperti jembatan kayu dan papan informasi yang digunakan sebagai sarana pendukung bagi pengunjung. Namun demikian, beberapa fasilitas pendukung lainnya masih memerlukan pembenahan agar dapat meningkatkan kenyamanan dan keamanan wisatawan.

### ***Coordination of Tourism Stakeholders***

Koordinasi antar pemangku kepentingan merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan destinasi wisata. Dalam konteks wisata hutan mangrove di Desa Ogomolos, koordinasi dilakukan antara pemerintah desa, Pokdarwis, serta masyarakat lokal. Pemerintah desa berperan sebagai pengarah sekaligus fasilitator dalam pengelolaan wisata, sedangkan Pokdarwis bertanggung jawab dalam pengelolaan operasional destinasi. Masyarakat lokal juga berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan mangrove serta mendukung aktivitas wisata yang berlangsung di kawasan tersebut. Meskipun koordinasi antaraktor telah berlangsung dalam berbagai kegiatan pengelolaan wisata, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem koordinasi tersebut belum terlembaga secara formal dan belum berjalan secara optimal. Koordinasi masih bersifat informal dan bergantung pada komunikasi langsung antaraktor. Kondisi ini menyebabkan beberapa program pengelolaan wisata belum terlaksana secara maksimal, terutama dalam hal perencanaan jangka panjang dan penguatan kelembagaan pengelola wisata. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur agar pengelolaan wisata dapat berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

### ***Destination Crisis Management***

Aspek manajemen krisis destinasi juga menjadi salah satu faktor penting dalam tata kelola wisata hutan mangrove. Manajemen krisis berkaitan dengan kemampuan pengelola destinasi dalam mengantisipasi berbagai risiko yang dapat mengganggu keberlanjutan wisata, baik yang bersifat lingkungan, sosial, maupun ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wisata hutan mangrove di Desa Ogomolos belum sepenuhnya didukung oleh perencanaan mitigasi risiko yang memadai. Pengelolaan wisata masih lebih berfokus pada aspek operasional dan pengembangan fasilitas dasar, sementara perencanaan terkait mitigasi risiko, keselamatan pengunjung, serta perlindungan ekosistem mangrove belum dirumuskan secara sistematis. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas manajemen krisis destinasi masih perlu diperkuat agar pengelolaan wisata dapat berjalan secara lebih aman dan berkelanjutan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana juga menjadi faktor yang mempengaruhi kemampuan pengelola dalam menangani berbagai potensi risiko yang mungkin terjadi di kawasan wisata. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan serta penyusunan standar operasional prosedur (SOP) terkait pengelolaan risiko destinasi wisata.

### ***Destination Marketing***

Pemasaran destinasi merupakan aspek penting dalam meningkatkan daya tarik dan jumlah kunjungan wisatawan. Dalam konteks wisata hutan mangrove di Desa Ogomolos, kegiatan pemasaran destinasi masih dilakukan secara sederhana dan belum memanfaatkan media promosi secara optimal. Promosi wisata umumnya dilakukan melalui informasi dari mulut ke mulut atau

kegiatan promosi terbatas yang dilakukan oleh pengelola wisata. Kondisi tersebut menyebabkan destinasi wisata mangrove di Desa Ogomolos belum dikenal secara luas oleh masyarakat di luar wilayah desa. Padahal kawasan tersebut memiliki potensi wisata yang cukup besar sebagai destinasi wisata berbasis lingkungan. Keterbatasan strategi pemasaran yang dilakukan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat kunjungan wisatawan ke kawasan wisata mangrove tersebut. Selain itu, lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan serta keterbatasan dalam pengelolaan krisis destinasi juga berdampak pada belum optimalnya kegiatan pemasaran wisata. Kurangnya promosi yang terintegrasi menyebabkan potensi wisata yang dimiliki desa belum dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

## **PENUTUP / KESIMPULAN**

Hasil studi ini terkait tata kelola wisata hutan mangrove di Desa Ogomolos, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, menunjukkan bahwa pengelolaan destinasi wisata tersebut telah melibatkan kerja sama antara pemerintah desa dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai wujud pelebagaan masyarakat serta pemberdayaan. Pemerintah desa berperan dalam penyusunan kebijakan, penyediaan dukungan anggaran, serta fasilitasi pengembangan wisata, sementara Pokdarwis bertanggung jawab dalam pengelolaan operasional kawasan wisata tersebut dan juga menjaga kebersihan kawasan, memelihara ekosistem mangrove, serta menyediakan berbagai usaha kecil yang mendukung kegiatan wisata. Namun demikian, hasil studi ini juga menunjukkan bahwa tata kelola wisata hutan mangrove di Desa Ogomolos belum optimal, dimana pada aspek koordinasi antar pemangku kepentingan belum terlembaga secara formal dan didukung oleh sistem koordinasi yang terstruktur dan berkelanjutan. Selain itu, pada aspek manajemen krisis destinasi juga belum dikelola secara optimal karena belum memenuhi perencanaan mitigasi risiko yang jelas terkait potensi gangguan lingkungan, keselamatan pengunjung, maupun keberlanjutan ekosistem mangrove. Selanjutnya pada aspek pemasaran destinasi, kegiatan promosi wisata mangrove di Desa Ogomolos bersifat konvensional dan belum optimal memanfaatkan media promosi digital melalui salah satunya media sosial. Hal ini menyebabkan potensi wisata mangrove yang dimiliki desa tersebut belum dikenal secara luas dan hal ini berdampak pada rendahnya tingkat kunjungan wisatawan.

Berdasarkan hasil studi tersebut, beberapa saran penting dalam tata kelola wisata hutan mangrove di Desa Ogomolos, sebagai berikut. Pertama, pemerintah desa bersama Pokdarwis perlu memperkuat sistem koordinasi antar pemangku kepentingan melalui pembentukan mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Kedua, pengelola wisata perlu menyusun perencanaan manajemen krisis destinasi yang mencakup upaya mitigasi risiko, perlindungan ekosistem mangrove, serta standar keselamatan bagi pengunjung. Perencanaan tersebut dapat diwujudkan melalui penyusunan standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan kawasan wisata serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan destinasi wisata berbasis lingkungan. Ketiga, strategi pemasaran destinasi perlu ditingkatkan dengan memanfaatkan berbagai media promosi yang lebih inovatif, seperti penggunaan media sosial, promosi digital, serta kerja sama dengan berbagai pihak yang bergerak di sektor pariwisata. Dengan strategi pemasaran yang

lebih efektif, potensi wisata mangrove di Desa Ogomolos diharapkan dapat dikenal secara lebih luas dan mampu menarik minat wisatawan untuk berkunjung.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bender, D. (2016). *Undang-Undang Desa dan implementasinya dalam pembangunan desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Bevir, M. (2012). *Governance: A very short introduction* (1. ed). Oxford Univ. Press.
- Dos Anjos, F. A., & Kennell, J. (2019). *Tourism, Governance and Sustainable Development. Sustainability*, 11(16), 4257. <https://doi.org/10.3390/su11164257>
- Glückler, J., Herrigel, G., & Handke, M. (Ed.). (2020). *Knowledge for Governance* (Vol. 15). Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-47150-7>
- Harefa, M. S., Pratama, A., Sihombing, E. T., Ilvaldo, I., Putri, A., Sembiring, Y. P., & Ramadani, Y. F. (2024). *Mangrove Ecotourism Area Management Strategy Sustainable at Paluh Getah Beach*.
- Nainggolan, R. R. E., Abi Suroso, D. S., Argo, T. A., & Sagala, S. A. H. (2024). *Multilevel governance for climate compatible development: A case study of mangrove governance in Indonesia. Journal of Infrastructure Policy and Development*, 8(6), 3740. <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i6.3740>
- Pemerintah Desa Ogomolos. (2023). *Profil Desa Ogomolos Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong*. Parigi Moutong.
- Prihadi, A., et al. (2025). *Pengelolaan ekosistem mangrove sebagai destinasi wisata berbasis lingkungan di wilayah pesisir. Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Pesisir*, 10(1), 45–56.
- Sheehan, L., & Ritchie, J. R. B. (2005). *TOWARDS A MODEL OF THE ROLES AND ACTIVITIES OF DESTINATION MANAGEMENT ORGANIZATIONS*.
- Syam, A. (2025). *Pengembangan wisata pesisir berbasis ekowisata di Kabupaten Parigi Moutong. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 9(1), 45–60.
- Wahyundi, R., et al. (2023). *Tata kelola destinasi pariwisata berbasis masyarakat dalam pengembangan wisata berkelanjutan. Jurnal Pariwisata Indonesia*, 18(2), 87–98.